

UPAYA PENEGAKKAN DISIPLIN KERJA ANGGOTA POLRI
DI POLRESTABES SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

ADE RIZKY SETYARSO
0841010001

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA

2012

**UPAYA PENEGAKKAN DISIPLIN KERJA ANGGOTA POLRI DI
POLRESTABES SURABAYA**

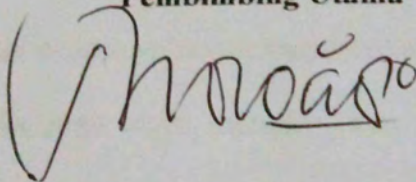
Disusun Oleh :

ADE RIZKY SETYARSO
NPM. 0841010001

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Drs. PUDJOADI, M.Si

NIP. 195105101973031001

Mengetahui

DEKAN



Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si.

NIP. 195802231987032001

UPAYA PENEGAKAN DISIPLIN KERJA ANGGOTA POLRI DI POLRESTABES SURABAYA

Oleh :

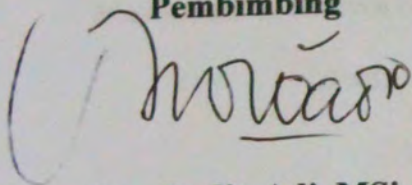
ADE RIZKY SETYARSO

NPM. 0841010001

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Pada Tanggal : 20 Juni 2012

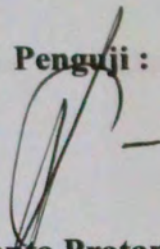
Pembimbing



Drs. Pudjo Adi, MSi
NIP. 195105101973031001

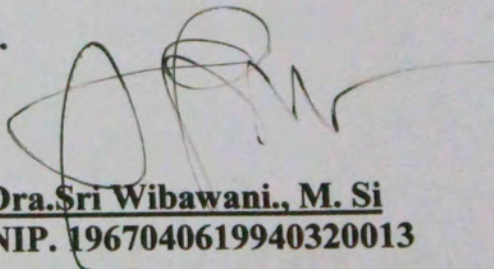
Tim Penguji :

1.



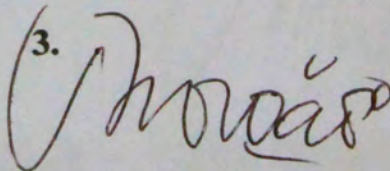
Drs. Ananta Pratama, MSi
NIP. 1968011619940320012

2.



Dra. Sri Wibawani, M. Si
NIP. 1967040619940320013

3.



Drs. Pudjo Adi, MSi
NIP. 195105101973031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi
NIP. 195802231987032001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “UPAYA PENEGAKKAN DISIPLIN KERJA ANGGOTA POLRI DI POLRESTABES SURABAYA”.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam tersusunnya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Pudjo Adi, MSi sebagai dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini :

1. Ibu Dra. Hj. Suparwati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Susi Hardjati M.AP Selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra.Sri Wibawani., M.Si selaku dosen penguji, terima kasih telah memberikan masukan-masukan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ananta Pratama, Msi, selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan masukan-masukan dan saran atas penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Pudjo Adi M.Si selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih telah memberikan petunjuk dan masukan-masukan atas penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kompol Masduki, SH, selaku Kasi Propam Polrestabes Surabaya yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di SiPropam Polrestabes Surabaya.
8. Bapak AKP Abdul Gafar selaku Kanit Provost SiPropam Polrestabes Surabaya atas bimbingan dan petunjuk-petunjuk nya selama saya melakukan penelitian.
9. Bapak AKP Eddy Suwarno selaku Kanit Paminal SiPropam Polrestabes Surabaya. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh staf SiPropam Polrestabes Surabaya dan segenap anggota Polrestabes Surabaya.
11. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibuku atas segala doa, fasilitas yang telah diberikan, dorongan semangat dan juga kasih sayang serta kesabaran yang tiada henti dalam mendukung menyelesaikan Skripsi skripsi ini.

12. Sayang ku Lissa Oktavianti yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan agar aku segera menyelesaikan skripsi ini. I Love You sayang.
13. Rekan-rekan Program Studi Administrasi Negara angkatan 2008 yang telah membantu dalam menyusun Skripsi skripsi ini cak kus, yudhi, agung, arie gondrong, arik restu, coki, ekky, mely, cahaya, lawi, iva, risa, widhat, faiza, kieke, andri, danar, gita, friki, trio, budi, agus, adhi, piccolo, almarhum yopang, revi, wak li, geru, dll.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut mendapat limpahan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi penelitian ini.

Harapan penulis semoga dengan terselesainya Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	 8
2.1. Penelitian terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	11
2.2.1. Birokrasi	11
2.2.2. Kepatuhan	11
2.2.2.1. Pengertian Kepatuhan.....	13
2.2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan.....	14
2.2.3. Disiplin kerja.....	17
2.2.3.1. Pengertian Disiplin Kerja	17

2.2.3.2. Macam-macam Disiplin Kerja	18
2.2.3.3. Pendekatan Disiplin Kerja	19
2.2.3.4. Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja.....	21
2.2.3.5. Upaya Penegakan Disiplin Kerja Pegawai	22
2.2.4. Pembinaan.....	24
2.2.4.1. Pengertian Pembinaan	24
2.2.4.2. Tujuan Pembinaan.....	25
2.2.4.3. Macam-macam dan bentuk Pembinaan.....	26
2.2.5. Pengertian Pengawasan	27
2.2.5.1. Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....	28
2.2.5.1.1. Tujuan Pengawasan.....	28
2.2.5.1.2. Fungsi Pengawasan	30
2.2.5.2. Macam-Macam Pengawasan	31
2.2.5.3. Cara-Cara Pengawasan.....	32
2.3. Kewajiban, Larangan dan Sanksi Anggota Polri	33
2.4. Kerangka Berpikir	38
BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Fokus Penelitian	41
3.3. Lokasi Penelitian	42
3.4. Sumber Data.....	43
3.5. Jenis Data.....	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	44

3.7. Analisis Data	45
3.8. Keabsahan Data.....	47
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	50
4.1.1. Sejarah terbentuknya Polrestabes Surabaya	50
4.1.2. Visi dan Misi Polrestabes Surabaya	54
4.1.3. Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya	55
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Polri Polrestabes Surabaya	57
4.1.5. Karakteristik Anggota Polri Polrestabes Surabaya	75
4.2. Hasil Penelitian	80
4.2.1. Disiplin Preventif	80
4.2.1.1. Pembinaan Rohani, Mental, dan Tradisi	80
A. Pembinaan Rohani.....	80
1. Pelaksanaan Pembinaan Rohani.....	80
2. Tujuan Pembinaan Rohani.....	86
3. Hambatan Pembinaan Rohani	87
B. Pembinaan Mental	88
1. Pelaksanaan Pembinaan Mental.....	88
2. Tujuan Pembinaan Mental	90
3. Hambatan Pembinaan Mental	91
C. Pembinaan Tradisi	93
1. Pelaksanaan Pembinaan Tradisi	93
2. Tujuan Pembinaan Tradisi	95

3. Hambatan Pembinaan Tradisi	96
D. Pengawasan Langsung.....	97
1. Pelaksanaan Pengawasan Langsung.....	97
2. Tujuan Pengawasan Langsung.....	100
E. Pengawasan Tidak Langsung	101
1. Pelaksanaan Pengawasan Tidak Langsung	101
2. Tujuan Pengawasan Tidak Langsung.....	103
4.2.2. Disiplin Korektif	104
A. Tindakan Disiplin	104
1. Pelaksanaan Sanksi Tindakan Disiplin.....	104
2. Tujuan Pemberian Sanksi Tindakan Disiplin	108
B. Hukuman Disiplin	109
1. Pelaksanaan Sanksi Hukuman Disiplin	109
2. Tujuan Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin.....	113
4.3. Pembahasan.....	115
4.3.1. Disiplin Preventif	115
A. Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi	115
B. Pengawasan Langsung.....	120
C. Pengawasan Tidak Langsung	122
4.3.2. Disiplin Korektif	123
A. Tindakan Disiplin.....	124
B. Hukuman Disiplin	127

BAB V. Kesimpulan dan Saran.....	131
5.1. Kesimpulan	131
5.2. Saran.....	135

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAKSI

ADE RIZKY SETYARSO, UPAYA PENEGAKKAN DISIPLIN KERJA ANGGOTA POLRI DI POLRESTABES SURABAYA

Penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa masih cukup tinggi jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri di Polerstables Surabaya. Prilaku tidak disiplin pada kewajiban-kewajiban yang seharusnya tidak dilanggar dengan berbagai macam jenis pelanggaran banyak diberitakan pada media cetak maupun elektronik bahkan sudah diberitakan secara global. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai peraturan disiplin anggota polri dalam peraturan pemerintah republik Indonesia no 2 tahun 2003. Maka untuk itu peneliti mengambil judul upaya penegakkan disiplin anggota polri dipolrestables Surabaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskriptifkan bagaimana upaya penegakan disiplin ditetapkan fokus pertama: upaya pembinaan disiplin preventif, dengan sasaran kajian pembinaan rohani mental dan tradisi serta pengawasan langsung maupun tidak langsung dan fokus kedua dengan sasaran kajian: penegakkan disiplin melalui tindakan disiplin dan hukuman disiplin.

Metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan analisis model interaktif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengabil data dari sumber data yang berupa tulisan, prilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, kata-kata. Dengan peneliti sebagai instrumen penelitian.

Kesimpulan dari hasil penelitian menyatakan bahwa Fokus pertama dengan sasaran kajian pembinaan rohani yaitu pelaksanaan kewajiban beragama agar membentuk jiwa keimanan yang kuat sehingga dapat mewujudkan disiplin anggota sehingga secara tidak langsung mengubah prilaku personel yang sudah disiplin agar tetap disiplin dan yang tidak disiplin menjadi disiplin, pembinaan mental diberikan dalam bentuk ceramah-ceramah, pelatihan-pelatihan dan tes psikologi untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan kemampuan jiwa dan fisik setiap personel agar dapat memantapkan prilaku dalam waktu, tempat dan kondisi tertentu saat sedang menjalankan tugas. dan pembinaan tradisi dalam bentuk apel baik apel bersama maupun apel fungsi yang dilaksanakan dalam satuan unit masing-masing untuk memelihara disiplin personel agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tribrata dan catur prasetya dan sasaran kedua pengawasan langsung dalam bentuk upacara apel, dan sidak untuk melihat kedisiplinan anggota dalam disiplin berpakaian, disiplin waktu, dan pengawasan dalam fungsi-fungsi kerja dilapangan. dan pengawasan tidak langsung melalui laporan informasi dari masyarakat dan media untuk melatih kesiagaan personel dalam berprilaku saat menjalankan tugas. dan fokus kedua dengan sasaran kaji yang pertama ialah melalui tindakan disiplin Untuk disiplin waktu dilakukan teguran lisan ketika ada anggota yang tidak mengikuti upacara apel. Dan tindakan fisik diberikan untuk pelanggaran dengan jenis ringan ketika anggota melakukan pelanggaran seperti terlambat, disiplin dalam berpakaian, dan disiplin dalam berkendara. sasaran kaji yang kedua melalui hukuman disiplin di berikan melalui proses sidang disiplin, tindakan disiplin dan hukuman disiplin sebagai penegakan disiplin dalam kewajiban, larangan dan sanksi disiplin Polri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut di atas tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri yang secara struktural tugas ini di emban dan dijalankan oleh fungsi-fungsi operasional, dimana mabes Polri sebagai pusat komando yang bertugas sebagai monitor dan pembuat kebijakan untuk tingkat nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi polri untuk mengamankan

kondisi dalam negeri yang dalam setiap tugasnya didukung oleh jajaran kepolisian yang tersebar di provinsi di seluruh Indonesia. dimana dalam setiap provinsi terdapat satu Mapolda sebagai pusat komando dalam pelaksanaan tugasnya. Yang didukung oleh Polrestabes yang berwenang dalam penegakkan hukum di wilayah kota besar dan di ikuti oleh polres sebagai jajarannya dalam tingkat kabupaten hingga polsek untuk wilayah kecamatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu organisasi pemerintah yang memiliki tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat, tentunya memiliki peranan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh sebagai pejabat negara yang di beri tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum, dan pemelihara keamanan. Kredibilitas dan Komitmen sebagai penegak hukum harus di dukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan. Sebagaimana bunyi pasal 27 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “ untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Disiplin itu sendiri menurut Hasibuan (2002 : 305) adalah merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin polri pasal 1 dijelaskan bahwa “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam organisasi, maka tindakan disiplin dan hukuman disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap anggota yang kinerjanya dibawah standar atau yang tidak disiplin.

Selain itu dalam penegakan disiplin menurut Saydam (2000:200-202), penegakan disiplin tidak bisa diserahkan kepada pegawai semata-mata. Untuk itu setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai. Yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin dan melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus-menerus. Pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kemiliteran kepada karyawan dan pelatihan mental-spiritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum atas alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.

Seperti yang diberitakan oleh media massa elektronik seperti dibawah ini ;

IpolJatim_Surabaya: Polrestabes surabaya menindak tegas terhadap 5 anggotanya yang nakal. Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Tri Maryanto memimpin langsung upacara Pemecatan Dengan Tidak Hormat Kepada 5 Anggotanya. Pemecatan dipicu karena ke 5 anggota polisi tersebut terlibat dalam tindak pidana dan indisipliner. “Ini menjadi pelajaran bagi anggota lain, prinsipnya anggota yang bersalah akan kami tindak tegas.” Kelima anggota polri tersebut memiliki pelanggaran yang berbeda. Pelanggaran pidananya berupa penipuan dan penggelapan sedangkan pelanggaran indisipliner berupa tidak masuk dinas selama 30 hari.” Mereka melakukan pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir,” tambah Kopol Suparti, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Senin(30/4/2012). (Sumber: http://infopoljatim.com/index.php?option=com_content&view diakses pada tanggal 2/5/2012)

Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Akan tetapi banyaknya

aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya.

Berkaca dari berbagai kasus pelanggaran disiplin yang timbul, seharusnya Polri sebagai institusi penegak hukum khususnya khususnya Polrestabes Surabaya, maka perlu adanya perhatian tersendiri dengan melakukan tindakan-tindakan dalam upaya pendisiplinan anggota polri. tindakan pendisiplinan tidak semata-mata harus dilakukan sebagai upaya koerktif dengan cara memberikan sanksi bagi anggota polisi yang terlibat kasus pelanggaran disiplin, namun tindakan pendisiplinan itu juga harus dilakukan dalam bentuk Preventif sebagai upaya dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran disiplin. Yaitu melalui pengawasan dan pembinaan disiplin anggota polri yang dilakukan secara berkelanjutan, sungguh-sungguh dan secara teratur sesuai dengan bidangnyaam sehingga mendorong terwujudnya peningkatan disiplin dan kegairahan kerja sehingga mampu memberikan layanan kepada publik secara maksimal. Dan dalam rangka menegakkan dan mempertahankan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam fungsi bidang struktural, instrument dan kultural dan sesuai dengan Keputusan Kapolri nomor: Kep/54/X/2002, maka di bentuklah Divisi Propam pada tanggal 27 Oktober 2002, yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan polri dan dalam pelayanannya terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota polri, yang dalam struktur organisasi dan tata kerjanya terdiri dari tiga bidang yang ber-bentuk sub

organisasi yang disebut Biro. Ke tiga Biro ini antara lain terdiri dari Biro Paminal yang bertugas sebagai fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI, kemudian Biro Wabprof yang dalam tugasnya berfungsi sebagai pertanggung-jawaban profesi, dan yang terakhir adalah Biro Provos yang berfungsi dalam penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI, ke-tiga Biro tersebut pada intinya mempunyai tugas sebagai pengawal, pengawas, pengamanan, pembinaan, dan penegakkan disiplin.

Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Bila tidak lagi dikontrol publik atau pers, kasusnya akan “menguap”. Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, manakala suatu kasus terbentur pada polisi berpangkat tinggi. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh Polri. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai "kultur" belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum

Sehubungan dengan fenomena diatas, maka oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang upaya penegakkan disiplin yang dilakukan oleh subbid Provos Bid Propam terhadap anggota polri khususnya di Polrestabes surabaya, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, “Upaya penegakkan disiplin kerja anggota polri di Polrestabes Surabaya”.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari fenomena dalam uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Upaya Penegakkan Disiplin kerja Anggota Polri di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penegakkan disiplin kerja anggota polri di Polrestabes Surabaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman tentang peranan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat dibangku kuliah dengan keadaan yang terjadi sebenarnya dilapangan.

2. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penegakkan disiplin di Polrestabes Surabaya.

3. Bagi universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan refrensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa dimasa mendatang.